

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yaitu tata kelola pemerintahan yang baik dalam mengintegrasikan data kemiskinan pada bappelitabngda kabupaten purbalingga dengan pendekatan menggunakan teori Sedarmayanti (2003) dengan 3 model tata kelola pemerintahan yang baik meliputi: Political Governance, Economic Governance, dan Administrative Governance dapat disimpulkan bahwa tata kelola pemerintah dalam mengintegrasikan data penduduk miskin pada Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga sudah baik dalam mengelola data kemiskinan di kabupaten purbalingga dengan membangun inovasi baru berupa aplikasi digital untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola data kemiskinan di Kabupaten Purbalingga dan mempunyai 3 strategi dalam pengentasan kemiskinan. Namun masih ada kekurangan dalam ketepatan sasaran, dikarenakan sifat data kemiskinan ini bersifat dinamis dan tentunya berubah-ubah. Tetapi Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga terus berusaha seoptimal mungkin untuk ketepatsasaran data penduduk miskin dengan cara memprioritaskan masyarakat yang lebih membutuhkan bantuan.

hal ini didapat berdasarkan hasil kesimpulan masing-masing indikator berikut:

1. Political Governance

a. Kebijakan Pemerintah Daerah

Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga memiliki peran penting dalam program pengentasan kemiskinan dan bertanggung jawab sebagai perencana, implementator, dan motivator untuk Organisasi Pemerintah Daerah. Bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk mengimplementasikan tiga strategi yaitu: mengurangi beban pengeluaran melalui subsidi, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pelatihan dan penempatan kerja, serta menghapus kantong-kantong kemiskinan dengan menyediakan akses sanitasi, air bersih, dan fasilitas pokok lainnya.

Selain itu, agar strategi ini berjalan lancar Bappelitbangda mengembangkan aplikasi Sipakisbangga sebagai inovasi dalam pengelolaan data kemiskinan yang berfungsi untuk menyimpan data, mendukung perencanaan, dan mengevaluasi program intervensi seperti rehabilitasi rumah layak huni (RTLH), peningkatan akses listrik, dan pengurangan pengangguran. Adanya aplikasi ini efektivitas dan efisiensi program pengentasan kesmikiran dapat ditingkatkan secara signifikan.

b. Partisipasi politik masyarakat

Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan melibatkan masyarakat dan pihak-pihak terkait contohnya, perangkat desa dan dinas-dinas teknis. Proses pengumpulan data penduduk miskin diawali dengan musyawarah desa yang melibatkan kepala desa, PBD, dan perwakilan warga untuk menyepakati kelompok penerima bantuan langsung tunai (BLT).

Agar memastikan ketepatan data, Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga bekerjasama dengan Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Rukun Tetangga (RT), dan kepala desa dalam proses verifikasi dan validasi data kemiskinan. Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi dari integritas dalam pengelolaan data untuk mendukung efektivitas program pengentasan kemiskinan.

2. Economic Governance

a. Dampak Ekonomi dari kesamaan data

Bappelitbangda menggunakan banyak sumber data, contohnya data P3KE dari Kemenko pmk, data DTKS dari Kemensos, dan data Sipakisbangga. Yang saat ini digunakan yaitu data dari Kemenko pmk yaitu Data P3KE. Sebagai langkah strategis untuk konsistensi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk mencapai kesamaan data agar

meningkatkan efektifitas program pengentasan kemiskinan secara menyeluruh.

b. Efisiensi penggunaan anggaran

Adanya kolaborasi yang kuat antar instansi pemerintah dalam Proses pengelolaan anggaran untuk program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga yang menghasilkan pencatatan penurunan angka kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah, artinya bahwa kebijakan dan alokasi anggaran yang dilaksanakan berjalan secara efektif dan efisien.

3. Administrative Governance

a. Prosedur dan mekanisme tata kelola data

Prosedur pengumpulan dan pengelolaan data di Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga menggunakan mekanisme yang terkoordinasi dengan berbagai pihak. Pengumpulan data menggunakan metode kuisioner yang dilakukan oleh pemerintah desa dan hasilnya dikelola oleh Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga sesuai dengan kebutuhan tahunan dan alokasi anggaran.

Walaupun belum ada SOP khusus terkait tahapan pengelolaan data penduduk miskin, Bappelitbangda tetap menjaga transparansi melalui aplikasi Sipakisbangga yang menjadi platform untuk mengunggah dan mengelola data penduduk miskin.

b. Koordinasi antar instansi

Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga mempunyai peran penting dalam hal koordinasi antar instansi dan pengelolaan data penduduk miskin ada beberapa langkah penting yang dilakukan seperti rapat koordinasi dengan instansi terkait, musyawarah desa, serta pembentukan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD). Selanjutnya menggunakan pendekatan analisis swot untuk menganalisis permasalahan, mengevaluasi kegiatan sebelumnya, dan merencanakan langkah yang lebih efektif.

c. Penggunaan teknologi informasi

Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga sudah membuat inovasi berupa aplikasi Sipakibangga untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Aplikasi sipakisbangga disusun untuk alat bantu yang terintegrasi untuk pengelolaan data kemiskinan di Kabupaten Purbalingga dengan memanfaatkan teknologi digital. Bappelitbangda bekerjasama dengan dinas komunikasi dan informatika (Dinkominfo) untuk menjaga keamanan aplikasi tersebut, sampai saat ini aplikasi sipakisbangga dinilai aman dan belum menghadapi kendala teknis yang menunjukkan bahwa langkah-langkah perlindungan yang diterapkan Dinkominfo sudah efektif.

d. Evaluasi dan monitoring

Proses evaluasi dan monitoring di Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga bertujuan untuk mengawasi dan mengevaluasi keberhasilan program pengentasan kemiskinan secara efektif, aplikasi sipakisbanga mempunyai peran penting dalam mempermudah proses evaluasi dan monitoring dengan menyediakan data yang diperbarui secara real-time. Pendekatan ini meningkatkan transparansi, keakuratan data, dan efektivitas dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga.

5.2 Implikasi

Berdasarkan kesimpulan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik dalam mengintegrasikan data penduduk miskin menggunakan teori Sedarmayanti (2003) pada Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga, implikasi yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Secara umum, sebagai instansi pemerintahan daerah Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam hal tata kelola pemerintah di harapkan bisa lebih baik lagi untuk mengelola data penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga agar data yang dikelola dapat terintegrasi dan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga bisa berjalan lebih baik lagi dan bantuan masyarakat miskin bisa tepat sasaran

dan bisa membantu menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga.

2. Dalam aspek political governance, upaya peningkatan kebijakan dan peran Bappelitbangda dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga perlu ditingkatkan agar kebijakan bisa berjalan dengan baik dengan adanya aplikasi sipakisbangga bisa menambahkan efektifitas dan efisiensi program pengentasan kemiskinan secara signifikan dan partisipasi masyarakat bisa membantu pada pendataan penduduk miskin.
3. Dalam aspek economic governance, perlu dilakukan evaluasi terhadap banyaknya sumber data yang digunakan Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga upaya konsistensi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan agar meningkatkan efektifitas program pengentasan kemiskinan secara keseluruhan.
4. Dalam aspek administrative governance, sub aspek prosedur dan mekanisme tata kelola data, perlu ditetapkan SOP khusus terhadap tahapan pengelolaan data penduduk miskin, upaya menjaga lebih ketat lagi terhadap data penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga. Diperlukannya surat permohonan terkait permintaan data yang diperlukan opd teknis, agar keamanan data kemiskinan terjaga dengan baik.

Dalam sub aspek koordinasi antar instansi agar tidak terjadi kendala dalam koordinasi antar instansi, lebih diperhatikan terhadap program-program

yang telah dilaksanakan dinas lain agar data yang di rapatkan bisa sesuai dan akurat.

Dalam sub aspek penggunaan teknologi informasi, dalam aplikasi sipakisbangga agar di update lagi dan dimaksimalkan pada aplikasinya agar tidak terjadi server down pada saat banyak yang membuka aplikasi tersebut. Terakhir dalam sub aspek evaluasi dan monitoring diharapkan bisa lebih diperhartikan dalam prses pencatatan dan dokumentasian agar mengurangi permasalahan perbedaan data kemiskinan di Kabupaten Purbalingga.

